

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola masyarakat perbatasan (studi kasus dampak pembangunan kawasan perbatasan bagi masyarakat Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka). Untuk mendeskripsikan tata kelola masyarakat perbatasan (studi kasus dampak pembangunan kawasan perbatasan bagi masyarakat Desa Alas Selatan Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka), penulis menganalisis dari beberapa aspek. Aspek-aspek yang dianalisis adalah (1) Pendekatan Kesejahteraan dan (2) Pendekatan Keamanan. Kedua aspek ini dianalisis sebagai berikut:

#### **5.1 Pendekatan Kesejahteraan**

Pendekatan kesejahteraan di kawasan perbatasan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan didorong melalui pembangunan infrastruktur dan transportasi masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan dengan cara mengangkat kondisi perekonomian mereka, kecukupan pangan, dan upaya peningkatan daya saing produksi lokal.

Untuk menggambarkan Aspek Kesejahteraan dalam Tata Kelola Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Dampak Pembangunan Kawasan Perbatasan Bagi Masyarakat Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten

Malaka), terdiri dari dua indikator berupa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, yang dapat dianalisis sebagai berikut.

### **5.1.1 Pembangunan Infrastruktur**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pendekatan kesejahteraan dari pembangunan infrastruktur berupa pembangunan Jalan Sabuk Merah dari Motaain ke Motamasin, pembangunan Jembatan Motamasin sebagai jembatan penghubung Indonesia-Timor Leste, pembangunan pasar perbatasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Berdasarkan hasil temuan maka penulis menganalisis dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan:

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat dari Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan, jembatan dan pasar perbatasan menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Motamasin dilaksanakan oleh BNPP RI. PLBN sendiri merupakan Pos Lintas Batas yang berperan dalam urusan teknis daerah perbatasan. BNPP RI membangun infrastruktur-infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat di kawasan perbatasan seperti jalan perbatasan (Jalan Sabuk Merah), Jembatan Motamasin yang menjadi penghubung Indonesia-Timor Leste serta pasar perbatasan sehingga masyarakat kawasan perbatasan dan masyarakat dari Suai (Timor Leste) tidak perlu jauh-jauh ke Betun untuk berbelanja kebutuhan mereka dan cukup berbelanja di pasar perbatasan setiap minggu. BNPP berkoordinasi

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat Kepala PLBN Motamasin

dengan PLBN, dengan begitu pihak PLBN juga ikut berperan dalam pembangunan dan pengembangan di kawasan perbatasan.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin yang mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

Untuk pembangunan sendiri PLBN tidak mempunyai anggaran, akan tetapi BNPP RI mempunyai anggaran untuk membangun infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan Motamasin, kami pihak PLBN berada dibawah koordinasi BNPP turut berperan dalam pembangunan di kawasan perbatasan. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang dibangun merupakan kebutuhan masyarakat dan sudah cukup merata seperti jalan Sabuk Merah dari Belu hingga Malaka, pasar Motamasin, jembatan penghubung Indonesia-Timor Leste.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md dan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin dapat dianalisis bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui pihak Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat di kawasan perbatasan seperti jembatan yang menjadi penghubung Indonesia-Timor Leste, Pasar Motamasin sehingga masyarakat kawasan perbatasan dan masyarakat dari Suai (Timor Leste) dapat berbelanja tanpa perlu jauh-jauh ke Betun dan Jalan Sabuk Merah dari Motaain hingga Motamasin

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan.<sup>3</sup>

Bicara soal pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Alas Selatan, kembali lagi kita melihat soal sumber dana pembangunannya itu sendiri, desa kami hanya kebetulan berada pada daerah perbatasan sehingga menjadi pusat perhatian dari Pemerintah Pusat. Namun seperti biasanya

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan

Desa Alas Selatan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemerintah Desa untuk membangun infrastruktur-infrastruktur guna meningkatkan pelayanan sekaligus pemberdayaan yang ada di desa. Anggaran yang akan digunakan untuk membangun perbatasan dalam hal pasar dan lain sebagainya adalah tugas PLBN bersama Pemerintah Pusat (BNPP) sehingga Pemerintah Desa tidak diijinkan untuk mengelola malah sebaliknya hanya sebagai pengguna.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wilhelmus Mali selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

Dalam hal pembangunan infrastruktur yang sudah di bangun oleh Pemerintah Pusat di desa kami itu seperti batas negara, pasar dan jembatan penghubung antar negara. Dampak yang saya rasakan dari adanya Pos Lintas Batas itu desa kami lebih banyak pengunjung ke desa kami, kehidupan kami mulai membaik salah satu contoh nyata yaitu kami sudah tidak susah dalam mendapatkan air bersih dikarenakan air leding langsung di rumah masing-masing. Akan tetapi kehidupan ekonomi masih begitu-begitu saja, mungkin ada beberapa yang merasakan dampak yang besar, kalau kami belum.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

Pembangunan di dalam desa kami mungkin belum cukup banyak. Dampak positif yang kami rasakan hingga saat ini yaitu akses yang memudahkan kami terkait pembangunan seperti jalan, jembatan dan pasar perbatasan. Dampak secara langsung kami sebagian warga kecil yang ekonominya masih sulit, belum terasa apalagi terkait pasar perbatasan yang semakin hari semakin sepi pengunjung. Akan tetapi bagi beberapa pihak mungkin merasakan dampak positif dari membaca potensi dan peluang yang ada pada pembangunan Pos Lintas Batas Negara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dapat dianalisis bahwa dampak dari pembangunan infrastruktur yang dirasakan dari adanya Pos Lintas Batas Negara, akses yang memudahkan, kehidupan masyarakat mulai membaik salah satu contoh adalah mendapatkan air bersih berupa air leding di

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Wilhelmus Mali selaku warga Desa Alas Selatan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas selatan

rumah masing-masing. Dampak secara langsung sebagian warga kecil yang ekonominya masih sulit, belum terasa apalagi terkait pasar perbatasan yang semakin hari semakin sepi pengunjung. Akan tetapi bagi beberapa pihak mungkin sudah merasakan dampak positif dari membaca potensi dan peluang yang ada pada pembangunan Pos Lintas Batas Negara tersebut. Kemudian hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Blasius Tahu selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>6</sup>

Seperti yang kita lihat sendiri pembangunan seperti jalan dan lain sebagainya sudah cukup membantu kami dalam hal akses. Itu artinya kami sudah semakin mudah melakukan usaha lalu kemudian dipasarkan. Hadirnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga membawa dampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat seperti terciptanya lapangan pekerjaan di PLBN, sekitar PLBN juga sudah banyak yang membuka usaha seperti warung, kios, dan bahkan toko, ada beberapa yang menyediakan mobil atau motor untuk disewakan bagi pengunjung dari luar negeri. Tetapi yang menjadi kendalanya pasar PLBN yang disediakan semakin hari semakin sepi pengunjung.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

Kami sebagai masyarakat tidak mengetahui secara baik soal pembangunan yang ada di desa ini. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang kami ketahui sejauh ini adalah pasar, jalan, jembatan penghubung negara Indonesia dan Timor Leste. Manfaat untuk kami sendiri saya kira tidak begitu banyak karena kehidupan kami dari dulu hingga sekarang masih seperti ini, apalagi kami rata-rata petani yang bekerja di ladang, tidak ada perubahan. Akan tetapi untuk akses kemana-mana sudah cukup mudah dan kehidupan sebagai masyarakat yang bekerja di batas mulai membaik dibandingkan sebelum adanya Pos Lintas Batas yang megah itu.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Blasius Tahu selaku warga Desa Alas Selatan

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, dapat dianalisis bahwa pembangunan infrastruktur sudah cukup memudahkan akses. Hadirnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) membawa dampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat seperti terciptanya lapangan pekerjaan di PLBN, sekitar PLBN juga sudah banyak yang membuka usaha seperti warung, kios, dan bahkan toko, ada beberapa yang menyediakan mobil atau motor untuk disewakan bagi pengunjung dari luar negeri. Tetapi yang menjadi kendalanya pasar PLBN yang disediakan semakin hari semakin sepi pengunjung. Kehidupan masyarakat rata-rata petani dan peternak yang memfokuskan masyarakat bertani dan beternak, juga yang membuat potensi dari hadirnya PLBN bagi sebagian masyarakat belum bisa membaca peluang.

Untuk memperkuat hasil wawancara di atas, berikut ini disajikan hasil dokumentasi dan tabel penelitian yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini :

**Gambar 5. 1**

**Jembatan Motamasin penghubung RI-RDTL**



*Sumber: Pos Lintas Batas Negara Motamasin*

Dilihat dari gambar 5.1 menggambarkan Jembatan Motamasin yang merupakan jembatan penghubung yang dibangun oleh Kementerian PUPR pada tahun 2017 dengan biaya sebesar Rp. 11 miliar, yang dikerjakan selama 8 bulan dengan panjang 35 meter. Jembatan Motamasin bersebelahan dengan negara Timor Leste. Jembatan Motamasin yang menjadi tempat bertemu masyarakat Indonesia dengan saudara atau kerabat yang terpisah negara. Masyarakat memanfaatkan zona netral yaitu jembatan ini yang separuhnya merupakan wilayah Indonesia dan separuhnya merupakan Timor Leste untuk sekedar ngobrol atau bertemu.

**Gambar 5. 2**

**Pasar Perbatasan Motamasin**



*Sumber: Dokumen Pribadi*

Dilihat dari gambar 5.2 menggambarkan bahwa terjadi aktivitas perdagangan di Pasar Motamasin. Pasar Perbatasan Motamasin merupakan zona pendukung yang dibuat menjadi kawasan komersial untuk menarik minat wisatawan dari luar, terutama Timor Leste untuk berbelanja di Indonesia. Terdiri dari pasar modern, toko serba ada (*convenience store*) dan *food court*. Pasar perbatasan Motamasin merupakan pembangunan infrastruktur tahap kedua menelan biaya Rp. 126 miliar, berada di zona pendukung PLBN Motamasin yang bersamaan dengan bangunan lainnya seperti Wisma Indonesia, *Mess Pegawai*, Gedung Serba guna, *Front Office*, *ATM*, *Money Changer*, *Entertainment Room*,

Sentra Kerajinan dan *Mini Market*. Pasar Motamasin beroperasi setiap hari senin pada pukul 05.00-11.00 WITA. Pedangan pasar menjual hasil berkebun, hasil laut, ternak, pakaian serta Sembilan Bahan Pokok

### **Gambar 5. 3**

#### **Jalan Sabuk Merah**



*Sumber: Media Online Lintasntt.com*

Dilihat dari gambar 5.3, menggambarkan Jalan Sabuk Merah yang menghubungkan Motaain Kabupaten Belu ke Motamasin Kabupaten Malaka. Jalan ini dibangun sepanjang jalur perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, dengan total panjangnya 179 kilometer dan lebar 2-7-2 (bahu jalan masing-masing 2 meter di kiri-kanan dan badan jalan 7 meter) tersebut mencapai Rp. 1.6 triliun ditambah dengan 40 jembatan. Terdapat 32 desa yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terdiri dari dua puluh tujuh desa dan enam kecamatan di Belu, dan lima desa dan dua kecamatan di Malaka. Sebelum dibangun jalan masyarakat mengalami kesulitan untuk datang ke kota. Satu-satunya alat transportasi sebelum jalan dibangun adalah menggunakan kuda. Tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, pembangunan jalan Sabuk Merah memperlancar akses masyarakat ke pasar, sekolah, gereja dan dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara yang telah dianalisis dan diperkuat dengan hasil dokumentasi, hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa pembangunan



infrastruktur yang ada di Desa Alas Selatan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menunjang daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur berupa Jalan Sabuk Merah, Jembatan Motamasin yang menghubungkan Indonesia dan Timor Leste, Pasar Motamasin atau pasar perbatasan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat perbatasan. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin menjadi salah satu peluang di kawasan perbatasan yang membawa dampak secara ekonomi seperti terciptanya lapangan pekerjaan, akses transportasi yang memudahkan, air bersih yang disalurkan dari rumah ke rumah serta infrastrukturnya sudah memadai namun belum ada pengelolaan yang baik, seperti salah satunya adalah pasar perbatasan yang diharapkan mampu membawa dampak yang dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat, akan tetapi kurang memberikan dampak secara ekonomi seperti yang diharapkan masyarakat yang tinggal kawasan perbatasan.

### **5.1.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendekatan kesejahteraan dari pemberdayaan masyarakat sudah ada dari pihak Pemerintah Desa namun belum mencapai hasil yang maksimal, dari pihak Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin tidak memberikan pemberdayaan tersebut karena bukan merupakan tugas dan fungsi dari pihak PLBN akan tetapi PLBN mempunyai fungsi mengembangkan kawasan perbatasan maka sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Hadirnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin di Desa Alas Selatan

diharapkan mampu menjadi potensi yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui pasar perbatasan yang sudah dibangun untuk pergerakan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian, masyarakat perbatasan belum semua mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam membaca peluang hadirnya PLBN tersebut. Berdasarkan hasil temuan ini penulis menganalisis dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan para informan:

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat dari Kepala PLBN Motamasin yang mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

Pihak Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak mempunyai tugas khusus untuk pemberdayaan masyarakat perbatasan. Kami hanya merekrut sebagian orang untuk menjadi pekerja atau karyawan, *security, cleaning service* dan staf di PLBN yang diambil dari masyarakat yang tinggal di sekitaran PLBN. Terkait dengan pasar PLBN, dulunya merupakan pasar milik Pemerintah Desa Alas Selatan, namun semenjak adanya PLBN, pasar yang namanya Namfalus milik Desa Alas Selatan yang sudah tidak layak tersebut dipindahkan ke pasar PLBN dan dikelola oleh pihak BNPP melalui PLBN Terpadu Motamasin. Dari pihak PLBN sudah melakukan sosialisasi terkait pasar perbatasan yang sudah dibuka kepada pihak Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur dan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang mau berjualan di pasar perbatasan tanpa dipungut biaya atau persyaratan apapun agar tidak mempersulit masyarakat.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin yang mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

Untuk pemberdayaan sendiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak mempunyai program pemberdayaan masyarakat, PLBN hanya mengelola perbatasan dengan mensosialisasikan di dua kecamatan yang berada di dekat PLBN yaitu Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur, bahwa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat Kepala PLBN Motamasin

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin

adanya sarana prasarana seperti pasar yang telah diambil oleh pihak PLBN dan dikelola oleh PLBN sendiri sehingga masyarakat perbatasan bisa menjual barang dagangan di pasar tersebut. Akan tetapi sampai sekarang kami pihak PLBN melihat pasar perbatasan yang makin sepi pengunjung dikarenakan 2 tahun terakhir pasar ditutup karena Covid-19 dan baru dibuka kembali pada 13 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md dan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin dapat dianalisis bahwa pemberdayaan masyarakat di perbatasan tidak dilakukan oleh pihak PLBN karena bukan tugas dan fungsi dari pihak PLBN. Pihak PLBN hanya merekrut pekerja atau karyawan, *security*, *cleaning service* dan beberapa staf di PLBN yang diambil dari masyarakat yang tinggal di sekitaran PLBN. Terkait dengan pasar PLBN, dulunya merupakan pasar milik Pemerintah Desa Alas Selatan, namun sudah tidak layak dan dipindahkan ke pasar PLBN dan dikelola oleh pihak BNPP melalui PLBN Terpadu Motamasin. Pihak PLBN mensosialisasikan di dua kecamatan yang berada di dekat PLBN yaitu Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur, bahwa adanya sarana prasarana seperti pasar namun semenjak Covid-19 pasar ditutup dan dibuka kembali pada 13 Juni 2022, pasar perbatasan semakin sepi pengunjung.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

Terkait pemberdayaan yang ada Desa Alas Selatan itu sudah menjadi tugas kami sebagai Pemerintah Desa. Pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa selama ini baru dilaksanakan seperti sosialisasi untuk kelompok tani dan ternak sapi karena mayoritas masyarakat adalah petani dan peternak, mengingat Kepala Desa baru dipilih dan dilantik awal tahun 2023. Dari dinas bersama Pemerintah

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan

Desa sebelumnya sudah membagikan bibit anak babi pedaging dan bibit jagung juga pupuk. Akan tetapi pemberdayaan terkait pemanfaatan PLBN termasuk pasar PLBN belum kami lakukan sehingga lebih banyak penjual di pasar PLBN itu berasal dari Betun yang menjual kebutuhan sembako sedangkan dari masyarakat desa kami rata-rata menjual hasil bumi seperti sayur, jagung dan ubi. Untuk peran BNPP melalui PLBN sendiri sejauh ini belum maksimal atau mungkin tidak ada dalam hal pemberdayaan dan harapan saya Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Desa harus sama-sama melakukan pemberdayaan, karena pentingnya pemberdayaan masyarakat perbatasan untuk kedepannya.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Blasius Tahu selaku warga

Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>11</sup>

Pemberdayaan masyarakat yang kami rasakan tidak begitu terasa, kami hanya disediakan ruangnya dan disosialisasikan akan tetapi pelatihan tidak ada. Mungkin dari Pemerintah Desa beberapa kali melakukan seperti pembagian bibit jagung dan pupuk terhadap kelompok tani dan kelompok ternak, juga kami sudah mengusulkan dalam Musyawarah Desa untuk pengadaan ternak sapi dan kami dihimbau untuk membersihkan kebun. Namun untuk pihak PLBN belum ada sejauh ini. Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan untuk bertani dan beternak karena mayoritas kami warga Alas Selatan itu bertani dan beternak, akan tetapi untuk pemberdayaan terhadap SDM kami dalam pemanfaatan potensi PLBN itu sendiri, dari pihak desa dan PLBN belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Alas Selatan dan masyarakat dapat dianalisis bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa baru dilaksanakan sosialisasi untuk kelompok tani dan ternak sapi karena mayoritas masyarakat adalah petani dan peternak. Dari dinas bersama Pemerintah Desa sebelumnya sudah membagikan bibit anak babi pedaging dan bibit jagung juga pupuk. Masyarakat mengusulkan dalam Musyawarah Desa untuk pengadaan ternak sapi dari dana desa dan masyarakat kemudian baru dihimbau untuk membersihkan kebun, untuk tahap selanjutnya belum diketahui. Untuk peran BNPP melalui PLBN sejauh ini belum ada

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Blasius Tahu selaku warga Desa Alas Selatan

pemberdayaan dan harapan masyarakat, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Desa harus sama-sama melakukan pemberdayaan, karena pentingnya pemberdayaan masyarakat perbatasan untuk kedepannya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wilhelmus Mali selaku warga Desa Alas Selatan.<sup>12</sup> “Sampai dengan saat belum ada pemberdayaan yang dilakukan, kami hanya sebatas diperlihatkan terkait pembangunan saja tapi tidak dengan pemberdayaan dari pihak PLBN sendiri hanya ada dari Pemerintah Desa. Untuk lapangan pekerjaan yang diambil mungkin cukup banyak tapi tidak dengan pemberdayaan”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>13</sup> “Menurut saya, kami masyarakat Desa Alas Selatan belum mendapatkan pemberdayaan itu secara langsung baik dari desa maupun pihak PLBN, mungkin pasar itu sendiri yang kami rasa bisa membantu kami secara ekonomi”.

Selanjutnya dijelaskan pada saat wawancara dengan Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

Sebenarnya berkaitan dengan pemberdayaan ini banyak lembaga yang sudah melakukan, tapi itu tidak tuntas sehingga kami merasa masih perlu untuk dibantu. PLBN sendiri hanya sebagai pos lintas batas dan BNPP sebagai badan pengelola perbatasan hanya melakukan pembangunan fisik saja tidak dengan pemberdayaan. Harapan kami sebagai warga, segera Pemerintah Desa dan pemerintah setempat bersama-sama memberdayakan kami masyarakat perbatasan untuk meningkatkan SDM kami sehingga kami bisa lebih membaca peluang-peluang bisnis dan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Wilhelmus Mali selaku warga Desa Alas Selatan

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas Selatan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan

keistimewahan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan itu sendiri sehingga kami tidak hanya berharap kepada desa saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Alas Selatan dan melihat dari hasil wawancara yang dianalisis sebelumnya, dapat dianalisis bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa di forum Musyawarah Desa yaitu usulan dari masyarakat untuk pengadaan ternak sapi dari dana desa dan himbauan dari Pemerintah Desa untuk membersihkan kebun namun belum diketahui proses selanjutnya, ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui terkait pemberdayaan yang ada. Masyarakat berharap Pemerintah Desa dan pemerintah setempat bersama-sama memberdayakan masyarakat perbatasan untuk meningkatkan SDM sehingga masyarakat bisa lebih membaca peluang-peluang bisnis dan keistimewahan tinggal di kawasan perbatasan untuk membantu secara ekonomi sehingga mereka tidak hanya berharap kepada desa saja.

Untuk memperkuat hasil wawancara, berikut disajikan hasil dokumentasi dan tabel penelitian yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

#### **Gambar 5. 4**

#### **Kondisi Pasar Perbatasan**



*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Dilihat dari gambar 5.4 menggambarkan bahwa kondisi pasar perbatasan Motamasin yang kembali beroperasi setelah ditutup selama dua tahun dan kembali dibuka pada 13 Juni 2022. Kondisi pasar hingga saat ini terbilang sepi karena ada beberapa faktor seperti terlalu jauh jarak dari pasar ke pemukiman masyarakat yang padat, barang-barang yang dijual tidak terlalu lengkap menurut masyarakat setempat. Pihak PLBN akan membuka pasar dari mingguan menjadi pasar harian dilihat apabila jumlah pengunjung yang bertambah banyak, namun pada kenyataannya pasar tersebut semakin sepi pengunjung.

**Tabel 5. 1**

**Penduduk Desa Alas Selatan Menurut Mata Pencaharian<sup>15</sup>**

<b>No</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah Orang</b>
1	Petani/Peternak	567
2	Tukang Kayu	11
3	Tukang Batu	0
4	Pedangan Kaki Lima	0
5	TNI/Polri	2
6	PNS	30
7	Pengusaha	3
8	Pensiunan PNS	20
9	Pensiunan TNI/Polri	0
10	Veteran	60
11	Montir	2
12	Guru	35
13	Lainnya	721
<b>J u m l a h</b>		<b>1.451</b>

*Sumber. Data Profil Desa Alas Selatan 2023*

Dilihat dari tabel 5.4 berisi tentang kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Desa Alas Selatan yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak sebanyak 567 orang. Hal ini disebabkan karena potensi terbesar dalam wilayah Desa Alas Selatan adalah lahan pertanian dan peternakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis diperkuat dengan hasil dokumentasi dan tabel mata pencaharian masyarakat Desa Alas Selatan,

<sup>15</sup> Profil Desa Alas Selatan tahun 2023

hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BNPP melalui PLBN tidak ada dikarenakan bukan merupakan tugas PLBN namun dalam pelaksanaan tugasnya PLBN juga bertugas untuk mengembangkan kawasan perbatasan. Dengan begitu salah satu aspek yang menjadi sangat penting adalah terkait pemberdayaan masyarakat agar pengembangan wilayah perbatasan dapat berjalan maju dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa di forum Musyawarah Desa yaitu usulan dari masyarakat untuk pengadaan ternak sapi dari dana desa dan himbauan dari Pemerintah Desa untuk membersihkan kebun namun belum diketahui proses selanjutnya. Masyarakat berharap Pemerintah Desa dan pemerintah setempat bersama-sama memberdayakan masyarakat perbatasan untuk meningkatkan SDM sehingga masyarakat bisa lebih membaca peluang-peluang bisnis dan keistimewahan tinggal di kawasan perbatasan untuk membantu secara ekonomi sehingga mereka tidak hanya berharap kepada desa saja.

## **5.2 Pendekatan Keamanan**

Pendekatan keamanan dalam pelaksanaan pembangunan harus berasal dari manusia, dilakukan oleh manusia, serta untuk kepentingan manusia. Upaya perlindungan terhadap keamanan manusia membuka peluang bagi wilayah perbatasan untuk mempercepat proses pembangunan, dengan keterkaitan yang erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang keamanan merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang mana terjaminnya kehidupan masyarakat akan keamanan, ketentraman dan kenyamanan. Perlunya tingkat keamanan dan rasa



aman yang tercipta terhadap masyarakat perbatasan akan bahaya ancaman, serta serangan dari negara lain.

Untuk menggambarkan Aspek Pendekatan Keamanan dalam Tata Kelola Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Dampak Pembangunan Kawasan Perbatasan Bagi Masyarakat Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka), terdiri dari dua indikator berupa *human security* (keamanan manusia) dan *societal security* (keamanan sosial).

### **5.2.1 Human Security (Keamanan Manusia)**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pendekatan keamanan dari *human security* atau keamanan manusia di kawasan perbatasan Motamasin masyarakat merasa jauh lebih aman dengan adanya kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN), karena di kawasan perbatasan selain PLBN yang menjaga keamanan ada juga pihak militer yang turut menjaga keamanan di sepanjang perbatasan. *Human security* adalah identik dengan anak-anak yang tidak mati, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak dihentikan, konflik etnis yang tidak berujung pada kekerasan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakatnya. *Human security* tidak berurusan dengan senjata. Lebih berurusan pada kehidupan manusia dan martabatnya, *human security* memandang keamanan tidak semata-mata dari perspektif kemiliteran namun juga non militer. Berdasarkan hasil temuan maka penulis menganalisis dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat dari Kepala PLBN Motamasin yang mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

Dengan dibangunnya PLBN Terpadu Motamasin, pengelolaan kawasan perbatasan sudah mulai teratur dan tertata. Awalnya kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan masih sangat bebas dan leluasa seperti keluar masuk negara sesuka hati. Kebebasan yang diperoleh itu diakibatkan oleh belum adanya PLBN. Tetapi sebelum adanya PLBN hubungan masyarakat WNI dan WNA sangat dekat dan erat. Hal ini dilatarbelakangi oleh hubungan se-etnis antar masyarakat perbatasan. Untuk keamanan dalam kehidupan masyarakatnya masih tergolong baik-baik saja. Masalah utama masyarakat disini adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi ini yang kemudian akan membuka peluang terjadi kesenjangan dan disintegrasi antar masyarakat perbatasan.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin yang mengatakan bahwa:<sup>17</sup>

Untuk PLBN sendiri sudah ada pihak keamanannya, ditambah lagi dengan abdi negara seperti TNI yang ikut menjaga keamanan negara. Untuk kemanan secara *human security*nya belum begitu terjamin, dikarenakan keadaan ekonomi masyarakatnya masih lemah. Kehidupan ekonomi yang lemah bisa menimbulkan penyeludupan-penyeludupan barang secara ilegal dari kerabat atau keluarga yang berada di negara tetangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md dan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin dapat dianalisis bahwa *human security* yang terjadi di kawasan perbatasan sudah aman, PLBN mempunyai Subbidang Kebersihan dan Keamanan, ditambah lagi dengan abdi negara seperti TNI yang ikut menjaga keamanan negara. Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan sebelum ada PLBN masih sangat bebas dan leluasa seperti keluar masuk negara sesuka hati dikarenakan hubungan masyarakat WNI dan WNA

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat dari Kepala PLBN

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN

sangat dekat dan erat oleh hubungan se-etnis antar masyarakat perbatasan. Untuk keamanan dalam kehidupan masyarakatnya masih tergolong baik-baik saja. Masalah utama masyarakat adalah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi ini yang kemudian akan membuka peluang terjadi kesenjangan dan disintegrasi antar masyarakat perbatasan. Kehidupan ekonomi yang lemah bisa menimbulkan penyeludupan-penyeludupan barang secara ilegal dari kerabat atau keluarga yang berada di negara tetangga. Hal ini dijelaskan lagi oleh Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

Semenjak adanya PLBN Motamasin keamanan masyarakat semakin terjamin. Secara ekonomi perubahan yang dapat dilihat di kehidupan masyarakat Desa Alas Selatan masih belum sepenuhnya meningkat. Dikarenakan tidak semua masyarakat merasakan kehadiran PLBN, bagi masyarakat yang pintar membaca peluang bisnis mungkin sudah merasakan kesejahteraannya sendiri. Saya kira ekonomi menjadi faktor utama terciptanya keamanan manusia yang baik. Tetapi terlepas daripada itu hubungan antar warga perbatasan baik-baik saja, yang menjadi persoalan adalah masih adanya masyarakat yang diam-diam melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara di kawasan perbatasan dengan alasan butuh uang.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh wawancara dengan Bapak Wilhelmus

Mali selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>19</sup>

Berkaitan dengan keamanan di kawasan perbatasan, pelintas batas sejauh ini sudah dijaga ketat dilakukan oleh pihak PLBN dan pihak Abdi Negara. Di lain hal, ada juga pelintas batas yang melintas secara ilegal dengan tujuan agar tidak mengeluarkan banyak biaya dan menghemat jarak dan waktu. Namun semakin kesini perilaku-perilaku ilegal seperti penyelundupan barang-barang dagangan, semakin berkurang dikarenakan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kehidupan ekonomi kawasan perbatasan yang masih prihatin, bisa saja sewaktu-waktu menjadi alasan untuk penyeludupan atau melintas secara ilegal ke negara tetangga agar menjual barang-barang dengan harga tinggi.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Wilhelmus Mali selaku warga Desa Alas Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Alas Selatan dan salah satu masyarakat Desa Alas Selatan dapat dianalisis bahwa semenjak adanya PLBN Motamasin keamanan masyarakat semakin terjamin. Secara ekonomi perubahan yang dapat dilihat di kehidupan masyarakat masih belum sepenuhnya meningkat. Dikarenakan tidak semua masyarakat merasakan kehadiran PLBN, bagi masyarakat yang pintar membaca peluang bisnis mungkin sudah merasakan kesejahteraannya sendiri. Namun kehidupan ekonomi kawasan perbatasan yang masih prihatin, bisa saja sewaktu-waktu menjadi alasan untuk penyeludupan atau melintas secara ilegal ke negara tetangga agar menjual barang-barang dengan harga tinggi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>20</sup> “Untuk keamanan manusia di desa kami, antar kami atau antar etnis baik-baik saja. Masalah atau konfliknya yang terjadi hanya masalah sepele di dalam desa kami. Semenjak adanya PLBN kami merasa aman bangga memiliki bangunan yang megah”.

Kemudian wawancara dengan Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

Kehidupan kami disini dari dulunya jarang terjadi konflik yang melibatkan kami dan warga negara asing. Pada dasarnya kami secara etnis sangat dekat sehingga kami baik-baik saja. Tetapi dengan adanya PLBN ini juga terkadang ada masyarakat yang merasa semakin sulit untuk berbisnis keluar masuk negara, apalagi dilihat dari mata uang

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas Selatan

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan

negara tetangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita sendiri. Sehingga dari sini banyak warga akhirnya memilih jalur ilegal. Akan tetapi sejauh ini sudah semakin berkurang penyeludupan secara ilegal. Terkait merasa aman, ya kami merasa aman karena sudah ada pos batas itu dan para TNI yang berjaga di pinggiran jalur batas negara.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Blasius Tahu selaku warga

Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>22</sup>

Kami selama ini merasa aman-aman saja secara hubungan antar kami dengan negara tetangga dan masyarakat di desa kami. Kami warga desa Alas Selatan dengan warga negara asing sudah hidup berdampingan selama ini, dari sebelum adanya PLBN. Setelah adanya PLBN juga kehidupan kami menjadi aman dan kami juga sering bepergian ke Timor Leste untuk urusan adat dan keagamaan, dikarenakan syarat yang mudah kami dapatkan untuk melintas yang membuat kami sering ke sana. Masalah yang kami rasakan mungkin lebih kepada pembangunan secara ekonomi yang masih minim, mungkin kami yang belum bisa membaca peluang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Alas Selatan dapat dianalisis bahwa masyarakat merasa bangga dengan hadirnya PLBN yang begitu megah. Setelah adanya PLBN kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan jarang terjadi konflik masyarakat sekitar perbatasan dengan masyarakat di negara tetangga, bahkan masyarakat sering bepergian ke Timor Leste dikarenakan syarat administrasi yang mudah mereka dapatkan untuk urusan adat dan keagamaan. Hadirnya PLBN menjadi peluang baru untuk mencari nafkah, namun yang dirasakan oleh masyarakat dari segi ekonomi masih minim karena masyarakat belum bisa membaca peluang yang ada dan pemberdayaan yang belum merata.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Blasius Tahu selaku warga Desa Alas Selatan

Untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dianalisis, berikut disajikan hasil dokumentasi dan tabel penelitian yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini :

**Tabel 5. 2**

**Data Keimigrasian PLBN Motamasin Pelintas Orang**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>WNI</b>	<b>WNA</b>
1	Januari	<b>1.573</b>	<b>171</b>
2	Februari	<b>1.332</b>	<b>676</b>
3	Maret	<b>1.249</b>	<b>1.141</b>
4	April	<b>1.405</b>	<b>716</b>
5	Mei	<b>1.098</b>	<b>876</b>
6	Juni	<b>1.433</b>	<b>1.083</b>
7	Juli	<b>1.514</b>	<b>1.189</b>
8	Agustus	<b>1.932</b>	<b>1.383</b>
9	September	<b>1.397</b>	<b>855</b>
<b>Jumlah</b>		<b>12.933</b>	<b>8.090</b>

*Sumber: Data Keimigrasian PLBN Motamasin 2023*

Dilihat dari tabel 5.2 berisi data bahwa masyarakat yang melintas di Pos Lintas Batas Negara Motamasin dengan jumlah yang banyak setiap bulan bisa mencapai 1.932 orang, yang menandakan bahwa masyarakat dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing merasa aman saat melintasi dan juga berkunjung ke Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin.

## Gambar 5. 5

### Pelintas Batas



Sumber: Pos Lintas Batas Negara Motamasin

Dilihat dari gambar 5.5 di atas menggambarkan para pelintas batas yang sedang melintas di sekitaran PLBN. Agar *human security* berjalan dengan aman maka seorang pelintas batas harus memiliki syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi antara lain wajib mempunyai paspor. Dalam mengurus paspor, masyarakat bisa mengurus di Kantor Imigrasi di Kabupaten Belu dengan membawa persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran serta uang sebesar Rp. 350.000. Setelah melengkapi syarat-syarat tersebut, masyarakat yang hendak melintas batas langsung mengurus di bagian imigrasi PLBN Motamasin, lalu kemudian pelintas batas sudah bisa melintas ke Negara Timor Leste.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis dan diperkuat dengan data sekunder dan hasil dokumentasi, hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa *human security* atau keamanan manusia yang terjadi di kawasan perbatasan warga Desa Alas Selatan, Indonesia dengan warga Suai, Timor Leste, masyarakat merasa lebih aman dengan kehadiran Pos Lintas Batas Negara dibandingkan dengan sebelum adanya PLBN. Dengan adanya kehadiran Pos Lintas Batas Negara di kawasan perbatasan, yang mempunyai fungsi menjaga keamanan ada

juga pihak militer yang turut menjaga keamanan di sepanjang perbatasan. Namun dari segi kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan merasa bahwa mereka masih tergolong lemah dan mengalami ketertinggalan ekonomi.

### **5.2.2 Societal Security (Keamanan Sosial)**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendekatan keamanan dari *societal security* atau keamanan sosial di kawasan perbatasan Motamasin setelah adanya PLBN Terpadu Motamasin, masyarakat merasa aman dalam kehidupan warga desa dimulai dari sudah terciptanya lapangan pekerjaan, keberlanjutan dari kebiasaan masyarakat, budaya hingga agama tidak ada yang berubah atau diubah dikarenakan dulunya masyarakat Desa Alas Selatan dan Suai (Timor Leste) adalah satu hanya saja sekarang berbeda negara. *Societal security* (keamanan sosial) ialah mengenai ancaman terhadap keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, identitas etnik. Oleh sebab itu, perhatian terhadap *societal security* dalam implementasi program pembangunan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga keberadaan identitas masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan. Berdasarkan temuan ini dapat dianalisis dari hasil wawancara penulis dengan para informan sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat dari Kepala PLBN Motamasin yang mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

Salah satu pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan dalam negara itu salah satunya adalah PLBN. Selain itu negara juga ikut membangun kawasan perbatasan mulai dari darat, terkait keamanan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md selaku mandat dari Kepala PLBN



manusia dari adanya PLBN itu sudah terasa akan tetapi terkait dengan keamanan sosial seperti keberlanjutan dari kebiasaan serta budaya yang ada, mereka masih satu budaya yang sama. Ancaman-ancaman terkait terbatasnya akses, lapangan pekerjaan, serta pembatasan hak-hak kebebasan masyarakat, tidak ada. Mungkin terkait akses keluar masuk negara sudah dipermudah dengan menggunakan paspor, dan sudah terciptanya lapangan pekerjaan di kawasan perbatasan, tinggal saja masyarakat yang pandai membaca peluang yang ada. Kami hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di PLBN.

Kemudian ditambahkan oleh Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin yang mengatakan bahwa:<sup>24</sup> “Pemerintah sendiri sudah membangun infrastruktur untuk mempermudah akses masyarakat perbatasan di dalam negeri maupun keluar negeri. Hadirnya PLBN merupakan wujud dari upaya peningkatan keamanan negara, termasuk keamanan manusia dan keamanan sosialnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andreas Ignatius, A.Md dan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN Motamasin dapat dianalisis bahwa *societan security* atau keamanan sosial yang terjadi di kawasan perbatasan sudah aman, dilihat dari keamanan manusia dari adanya PLBN sudah terasa akan tetapi terkait dengan keamanan sosial seperti keberlanjutan dari kebiasaan serta budaya yang ada, masyarakat Desa Alas Selatan dan masyarakat Suai masih satu budaya yang sama. Akses keluar masuk negara sudah dipermudah dan sudah terciptanya lapangan pekerjaan dari hadirnya PLBN Motamasin.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Puspitorini, SP selaku staf PLBN

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Gregorius Hale, S.Ag selaku Kepala Desa Alas Selatan

Keamanan sosial masyarakat yang saya rasakan adalah banyak masyarakat yang sudah mulai terbantu dengan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikawasan perbatasan. Dengan adanya pembangunan ini ada sebagian orang yang mendapatkan lapangan kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya dan akses yang mempermudah. Terkait kebiasaan dan budaya yang ada di desa saya, tidak ada yang berubah atau diubah. Justru ketika ada keluarga maupun kerabat yang mengadakan upacara adat atau keagamaan di Timor Leste khususnya Suai, masyarakat dari Desa Alas Selatan berpergian untuk menghadiri langsung ke Suai. Tidak ada yang berubah dari kebiasaan sebelum dan sesudah berpisah negara. Kalau upacara 17 Agustus masyarakat dari Suai juga diundang mengikuti upacara bendera di PLBN Motamasin bersama-sama dengan kami masyarakat desa. Akan tetapi pelaksanaan program pembangunan yang kurang memperhatikan eksistensi mereka sebagai sebuah kelompok masyarakat bisa saja berakibat dikemudian hari. Terkait berpergian keluar negeri masyarakat setempat juga banyak mengeluh karena biaya paspor yang mahal akan tetapi mereka juga wajib mengikuti acara-acara tersebut.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Blasius Tahu selaku warga

Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

Keamanan sosial yang tercipta di desa kami sudah ada seperti sudah banyak lowongan pekerjaan, tidak adanya perubahan adat serta budaya karena berbeda negara. Kami dan sebagian masyarakat asli desa ini kesulitan dalam hal finansial apalagi kalau ada acara keluarga di negara sebelah, kami butuh banyak uang untuk mengurus paspor. Pembangunan di desa kami sangat banyak dan PLBN yang megah membuat kami bangga karena ada di desa kami, tetapi percuma saja kalau hanya sebagian kecil masyarakat dari desa kami yang mampu memanfaatkan dengan baik, sebagian besar tidak. Pekerjaan kami sehari-hari hanya bertani dan beternak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Alas Selatan dan masyarakat dapat dianalisis bahwa keamanan sosial masyarakat yang dirasakan adalah sudah mulai terbantu dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pembangunan ini ada sebagian orang yang mendapatkan lapangan kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Blasius Tahu selaku warga Desa Alas Selatan

dan akses yang mempermudah namun sebagian kecil masyarakat yang mampu memanfaatkan dengan baik, sebagian besar tidak. Pekerjaan sehari-hari masyarakat hanya bertani dan beternak. Terkait kebiasaan dan budaya yang ada di desa, menurut masyarakat tidak ada yang berubah atau diubah. Justru ketika ada keluarga maupun kerabat yang mengadakan upacara adat atau keagamaan di Timor Leste khususnya Suai, masyarakat dari Desa Alas Selatan berpergian untuk menghadiri langsung ke Suai.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>27</sup>

Menurut saya pemerintah sudah banyak membangun akhir-akhir ini tetapi masih saja kami belum merasa puas dan leluasa, karena kami yang dulunya mudah untuk keluar masuk negara sekarang dengan adanya PLBN kami semakin sulit untuk bepergian keluar negara. Apalagi kalau kami mau ke Suai untuk mengikuti acara-acara adat atau keagamaan hanya sehari saja kami harus mengurus paspor sebesar Rp.350.000, itu cukup mahal bagi kami, apalagi kami masyarakat yang hanya bertani dan beternak, penghasilan kami sangat minim. Uang untuk mengurus paspor sebaiknya kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan merelakan tidak mengikuti acara-acara yang kami wajib hadir seperti adat atau kedukaan.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>28</sup> “Kami belum merasakan keamanan sosial kami itu ada, dikarenakan kami secara ekonomi masih sulit. Kalau dari budaya, adat dan kebiasaan kami masih sama karena kami dulunya satu. Kami kesulitan berpergian keluar negeri karena uang kami tidak cukup untuk urus paspor, sebaiknya uang kami simpan saja untuk belanja kebutuhan”.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Madariksa Kamlasi selaku warga Desa Alas Selatan

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Maternus Berek selaku warga Desa Alas Selatan

Jawaban senada juga disampaikan juga oleh Bapak Wilhelmus Mali selaku warga Desa Alas Selatan yang mengatakan bahwa:<sup>29</sup> “Sejauh ini pembangunan yang dilakukan di daerah kami sudah semakin membaik, tetapi upaya pemanfaatan ruang pembangunan ini, oleh kami masyarakat yang masih lemah. Keamanan yang ada di desa kami sudah sangat terjamin dan kami juga merasa aman dan nyaman, akan tetapi kehidupan ekonomi yang mempersulit kami apalagi untuk pergi keluar negara”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Alas Selatan dapat dianalisis bahwa keamanan sosial atau *societal security* yang terjadi di Desa Alas Selatan yaitu pembangunan yang dilakukan sudah semakin membaik, tetapi upaya pemanfaatan ruang pembangunan ini, oleh masyarakat yang masih lemah. Keamanan yang ada sudah sangat terjamin dan masyarakat juga merasa aman dan nyaman, akan tetapi kehidupan ekonomi yang mempersulit apalagi untuk pergi keluar negeri masyarakat merasa kesulitan berpergian karena biaya untuk mengurus paspor terbilang mahal yaitu sebesar Rp. 350.000 dan mengurus paspor dilakukan di Kantor Imigrasi di Kabupaten Belu yang cukup memakan biaya transportasi, makan dan sebagainya. Masyarakat merasa bahwa sebaiknya uang tersebut disimpan saja untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dianalisis, berikut disajikan tabel penelitian yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini :

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Wilhelmus Mali selaku warga Desa Alas Selatan

**Tabel 5. 3**

**Lokasi, Maksud dan Tujuan Pelintas di PLBN Motamasin<sup>30</sup>**

Lokasi Tujuan Pelintas		Maksud Dan Tujuan Pelintas
Indonesia	Atambua	- Wisata (40 %) - Kunjungan Keluarga (30 %))
	Betun	- Belanja (20%) - Berobat (10%)
Timor Leste	Suai	- Kunjungan Keluarga (50 %) - Belanja (25%)
	Salele	- Bekerja (25%)

Sumber: Data Keimigrasian PLBN Motamasin Tahun 2022-2023

Dilihat dari tabel 5.2 berisi data masyarakat Desa Alas Selatan masih banyak yang memiliki keluarga, saudara atau kerabat yang tinggal di Timor Leste. Jika merujuk catatan kantor imigrasi PLBN Terpadu Motamasin, pelintas batas di sini lebih banyak karena keperluan keluarga, seperti acara-acara adat, menengok saudara, orang tua atau anak. Alasan mereka bepergian ke Timor Leste kebanyakan karena keperluan keluarga. Hal ini dapat dimaklumi karena dulu sebelum Timor Leste berpisah dengan Indonesia masyarakat di sini tinggal dalam satu wilayah yang sama. Mereka memanfaatkan zona netral yaitu jembatan Motamasin yang separuhnya merupakan wilayah Indonesia dan separuhnya merupakan wilayah Timor Leste untuk sekedar ngobrol atau bertemu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis, dan diperkuat dengan tabel Lokasi, Maksud dan Tujuan Pelintas di PLBN Motamasin, hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa *societal security* atau keamanan sosial dari hadirnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin di dalam kehidupan warga desa dimulai dari sudah terciptanya lapangan pekerjaan, keberlanjutan dari kebiasaan masyarakat, budaya hingga agama tidak ada yang berubah atau diubah

<sup>30</sup> Data Keimigrasian PLBN Motamasin Tahun 2022-2023

dikarenakan dulunya masyarakat Desa Alas Selatan dan Suai adalah satu hanya saja sekarang berbeda negara. Keamanan yang sangat terjamin dan masyarakat juga merasa aman dan nyaman, akan tetapi dalam kehidupan ekonomi yang mempersulit apalagi untuk pergi keluar negeri untuk urusan adat, keagamaan maupun kedukaan, masyarakat merasa kesulitan berpergian karena biaya untuk mengurus paspor terbilang mahal yaitu sebesar Rp. 350.000 karena dalam mengurus paspor dilakukan di Kantor Imigrasi di Kabupaten Belu yang cukup memakan biaya transportasi, makan dan sebagainya. Masyarakat lebih memilih uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.